



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
(STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DOMPU)**

Hartoyo¹, Arsad²

¹Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima

²Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima

hartoyobima132@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<i>Keywords:</i> Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompus tahun 2015-2019 dilihat dari: (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Rasio Efektivitas PAD, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Keserasian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompus. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompus dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Dompus sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Dompus sebesar 99,61% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

PENDAHULUAN

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu

kesehatan dan keamanan.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007: 231).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Dompu antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Dompu, karena itu Pemerintah Kabupaten Dompu sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan

roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Dompu berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Dompu, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi, 1986: 199). Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986: 99), yaitu: (1) Kemampuan struktural organisasinya, (2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah, (3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, dan (4) Kemampuan Keuangan Daerah.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) : (1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah; (2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan; dan (3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam (Abdul Halim 2007:230): (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; (3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; (5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran

Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi: (1) Indikator Masukan (Inputs), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan; (2) Indikator Proses (Process), adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jas; (3) Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa; (4) Indikator Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai; (5) Indikator Manfaat (Benefit), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat; dan (6) Indikator Dampak (Impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan (BPKAD) Kabupaten Dompu dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu?

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian adalah desain penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Rancangan penelitian akan sangat berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Subyek penelitian adalah bagian keuangan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. Teknik Pengumpulan Data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini data adalah: (1) rasio derajat desentralisasi fiskal, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan; (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), yaitu menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahsun, 2009); (3) Rasio Efektivitas (PAD), yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas (PAD), maka semakin baik kinerja pemerintah daerah; (4) Rasio Efisiensi

Keuangan Daerah, yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik; (5) Rasio Keserasian, yaitu menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Dompu terdiri dari 8 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 72 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 524.677 jiwa dengan luas wilayah 3.405,63 km² dan sebaran penduduk 154 jiwa/km². Pada Tahun 2009 dibentuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dompu.

Pada Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipecah menjadi dua yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, itulah awal mulanya terbentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu, dalam Peraturan Bupati tersebut (BPKAD) Terdiri dari lima Bidang yaitu Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dan Bidang Aset.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu, (BPKAD) yang awalnya terdiri dari empat Bidang dirubah menjadi 5 Bidang yang terdiri Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Bidang Aset.

B. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan (BPKAD) Kabupaten Dompu dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2015-2019. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu pada penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dompu yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Dompu. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1. Penghitungan Rasio PDF BPKAD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2015	41.620.458.144,00	643.901.838.064,00	6,46	Sangat Kurang
2016	50.203.192.750,00	711.701.566.955,00	7,05	Sangat Kurang
2017	49.696.650.709,00	722.238.085.646,00	6,88	Sangat Kurang
2018	47.087.584.059,00	809.229.173.421,00	5,82	Sangat Kurang
2019	67.022.069.902,00	1.007.776.182.838,00	6,65	Sangat Kurang

Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu, 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.1. di atas dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2015 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKAD Kabupaten Dompu sebesar 6,46%. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 7,05%, tahun berikutnya terjadi lagi penurunan menjadi 6,88%. Terjadi penurunan lagi pada tahun 2018 menjadi 5,82%, namun terjadi kenaikan di tahun 2019 menjadi 6,65%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu masih sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2. di bawah ini :

Tabel 5.2. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2015	41.620.458.144,00	592.594.398.466,00	7,02	instruktif
2016	50.203.192.750,00	647.663.147.705,00	7,75	instruktif
2017	49.696.650.709,00	672.541.434.937,00	7,39	instruktif
2018	47.087.584.059,00	743.695.142.362,00	6,33	instruktif
2019	67.022.069.902,00	912.112.701.186,00	7,35	instruktif

Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu (diolah), 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.2. di atas kemampuan keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2018 dimana nilainya sebesar 6,33% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,75%. Sedangkan tahun tahun lainnya yaitu tahun 2015, 2017, dan 2019 masing-masing sebesar : 7,02%, 7,39%, dan 7,35%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

3. Rasio Efektivitas (PAD)

Rasio Efektivitas (PAD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas (PAD) menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas (PAD) dapat dilihat pada tabel 5.3. di bawah ini:

Tabel 5.3. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD BPKAD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2015	30.732.453.000,00	41.620.458.144,00	135,43	Efektif
2016	45.377.729.000,00	50.203.192.750,00	110,63	Efektif
2017	50.000.000.000,00	49.696.650.709,00	99,39	Tidak Efektif

2018	56.500.000.000,00	47.087.584.059,00	83,34	Tidak Efektif
2019	58.400.000.000,00	67.022.069.902,00	114,76	Efektif

Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu (diolah), 2020.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.3. di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu pada tahun 2017 dan 2018 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 99,39% dan 83,34%. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2019 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 135,43%, 110.63%, dan 114,76%.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.4. di bawah ini:

Tabel 5.4. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapata (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2015	568.072.452.180,00	643.901.838.064,00	88,22	Cukup Efisien
2016	769.142.354.777,00	711.701.566.955,00	108,07	Tidak Efisien
2017	804.635.000.321,00	722.238.085.646,00	111,41	Tidak Efisien
2018	797.077.475.755,00	809.229.173.421,00	98,49	Kurang Efisien
2019	925.821.578.064,00	1.007.776.182.838,00	91,87	Kurang Efisien

Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu (diolah), 2020.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.4. di atas Efisiensi Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu pada tahun 2015 tergolong cukup efisien karena interval efisiensinya diantara 80%-90%. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar dari pada realisasi belanja daerah. Tahun 2016 dan 2017 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya sudah di atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2018 dan 2019 efisiensinya tergolong Kurang Efisien yaitu sebesar 98,49% dan 91,87%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Be;anja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 5.5. Dan tabel 5.6. di bawah ini :

Tabel 5.5. Penghitungan Rasio Keserasian BPKAD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015-2019 (Belanja Operasi)

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2015	568.072.452.180,00	425.300.060.386,00	74,87
2016	769.142.354.777,00	577.494.559.219,00	75,08
2017	804.635.000.321,00	733.757.544.269,00	91,19
2018	797.077.475.755,00	743.451.499.455,00	93,27
2019	925.821.578.064,00	818.040.451.153,00	88,36

Sumber: BPKAD Kabupaten Dompu (diolah), 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.5. di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi (BPKAD) Kabupaten Dompu 86,93%. Dimulai pada tahun 2015 di mana rasio nya sebesar 74,87% meningkat pada tahun 2016 menjadi 75,08%, dan mengalami peningkatan lagi menjadi 91,19% pada tahun 2017. Tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 93,27%, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yaitu menjadi 88,36%.

Tabel 5.6. Penghitungan Rasio Keserasian (BPKAD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015-2019 (Belanja Modal)

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2015	568.072.452.180,00	112.130.944.050,00	19,74
2016	769.142.354.777,00	141.454.931.615,00	18,39
2017	804.635.000.321,00	69.902.568.615,00	8,69
2018	797.077.475.755,00	53.346.801.300,00	6,69
2019	925.821.578.064,00	105.829.479.211,00	11,43

Sumber Data : (BPKAD) Kabupaten Dompu (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.6. di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal (BPKAD) Kabupaten Dompu 13,16%. Dimulai pada tahun 2015 dimana rasio nya sebesar 19,74% mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 18,39%, dan mengalami penurunan lagi menjadi 8,69% pada tahun 2017. Tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 6,69%, namun pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 11,43%.

C. PEMBAHASAN

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Pada Tabel 5.1. menunjukkan bahwa (PAD) Kabupaten Dompu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2015 (PAD) Kabupaten Dompu sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 6,46% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp 50.203.192.750,00 atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2017 (PAD) Kabupaten Dompu mengalami penurunan menjadi Rp 49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 47.087.584.059,00 atau sebesar 5,82% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.

Total pendapatan daerah Kabupaten Dompu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2015 total pendapatan daerah sebesar Rp 643.901.838.064,00. Mengalami kenaikan sebesar 10,53% atau menjadi Rp 711.701.566.955,00 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 total pendapatan daerah sebesar Rp 722.238.085.646,00 naik 1,48% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2018 naik sebesar 12,04 % atau menjadi Rp 809.229.173.421,00. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 24,54% atau menjadi Rp 1.007.776.182.838,00.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.1. dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2015 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada (BPKAD) Kabupaten Dompu sebesar 6,46%, naik menjadi 7,05% pada tahun 2016. Tahun 2017 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada (BPKAD) Kabupaten Dompu sebesar 6,88%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,82%, namun terjadi kenaikan di tahun 2019 menjadi 6,65%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu masih Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%.

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 5.1. dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Dompu masih Sangat Kurang karena masih berada dalam skala interval 0,00% - 10,00% dan ini berarti bahwa (PAD) memiliki kemampuan yang Sangat Kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena (PAD) di Kabupaten Dompu masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan (PAD) tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Untuk karena itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan untuk berupaya meningkatkan (PAD) nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2008) di Sragen dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen tahun 2002-2006 jika

dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini masih tergolong Sangat Kurang karena rata-rata rasionya sebesar 9,69%. Hal tersebut kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi di Kabupaten Dompu dimana rata-rata kinerja keuangannya sebesar 6,57% dan tergolong Sangat Kurang meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaan tahun penelitiannya. Menurut Sri Wahyuni permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Sragen adalah ketidakmampuan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada guna meningkatkan (PAD) dan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap bantuan ataupun pinjaman dari pemerintah pusat. Begitupun juga yang terjadi di Kabupaten Dompu dimana peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dompua dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong sangat kurang.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada Tabel 5.2. menunjukkan bahwa (PAD) Kabupaten Dompu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2015 (PAD) Kabupaten Dompu sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 6,46% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp 50.203.192.750,00 atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2017 (PAD) Kabupaten Dompu mengalami penurunan menjadi Rp 49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 47.087.584.059,00 atau sebesar 5,82% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.2. menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 sebesar Rp 592.594.398.466,00, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan 9,29% atau sebesar Rp 647.663.147.705,00. Pada tahun 2017 sebesar Rp 672.541.434.937,00 atau naik 3,84% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sebesar 10,58% atau menjadi Rp 743.695.142.362,00 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 22,65% atau menjadi Rp 912.112.701.186,00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, disamping itu juga diturunkannya dana perimbangan dari provinsi pada tahun 2018 dan 2019.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.2. kemampuan keuangan BPKAD Kabupaten Dompu tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Berawal pada tahun 2015 Rasio Kemandirian sebesar 7,02%, kemudian naik menjadi 7,75% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 Rasio Kemandirian sebesar 7,39% kemudian turun pada tahun 2018 sebesar 6,33%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 7,35%. Jika dilihat dari tahun ke tahun

pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Dompu memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dompu dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan (PAD) untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan (PAD) yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Dompu sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan (PAD), misalnya pendirian (BUMD) sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada (2012) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2006-2010 jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong rendah sekali atau Instruktif. Rata-rata rasionya sebesar 4,95%. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Dompu pada penelitian ini dimana rata-rata rasionya sebesar 7,17% dan Kinerja Keuangannya tergolong Instruktif. Menurut Sri Widada penyebab terjadinya kinerja keuangan yang rendah sekali tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang mereka miliki sendiri guna menaikkan (PAD).

3. Rasio Efektivitas (PAD)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.3. menunjukkan bahwa anggaran (PAD) Kabupaten Dompu selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 (PAD) dianggarkan sebesar Rp 30.732.453.000,00 atau 5,03% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2016 anggaran (PAD) dinaikan menjadi Rp 45.377.729.000,00 atau 6,44% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2017 (PAD) dianggarkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 atau 7% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2018 anggaran (PAD) dinaikan menjadi Rp 56.500.000.000,00 atau 6,91% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2019 anggaran PAD kembali naik menjadi Rp 58.400.000.000,00 atau 5,91% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi (PAD) Kabupaten Dompu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2015 (PAD) Kabupaten Dompu sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 6,46% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp 50.203.192.750,00 atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2017 (PAD) Kabupaten Dompu mengalami penurunan menjadi Rp 49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 47.087.584.059,00 atau sebesar 5,82% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.3. dapat diketahui bahwa Efektivitas (PAD) Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu pada tahun 2015 sebesar 135,43%, tahun 2016 sebesar 110,63%, tahun 2017 sebesar 99,39%, tahun 2018 sebesar 83,34%, dan tahun 2019 sebesar 114,76. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Dompu untuk tahun 2017 dan 2018 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2015, 2016, dan 2019 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 5.3. Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Dompu sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Dompu juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan (PAD) yang telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan (PAD). Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan (PAD), misalnya pendirian (BUMD) sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang melakukan penelitian di Kabupaten Blitar dijelaskan bahwa kinerja keuangan Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas (PAD) sudah Efektif. Begitupun juga dalam penelitian ini dimana kinerja keuangan Kabupaten Dompu sudah efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan (PAD) yang telah direncanakan.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.4. diketahui realisasi total belanja daerah Kabupaten Dompu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2018 dimana terjadi penurunan belanja daerah. Pada tahun 2015 belanja daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp 568.072.452.180,00, naik menjadi Rp 769.142.354.777,00 pada tahun 2016. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 menjadi Rp 804.635.000.321,00. Dan pada tahun 2018 terjadi penurunan belanja daerah menjadi Rp 797.077.475.755,00, naik kembali pada tahun 2019 menjadi Rp 925.821.578.064,00.

Total pendapatan daerah Kabupaten Dompu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2015 total pendapatan daerah sebesar Rp 643.901.838.064,00. Mengalami kenaikan sebesar 10,53% atau menjadi Rp 711.701.566.955,00 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 total pendapatan daerah sebesar Rp 722.238.085.646,00 naik 1,48% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2018 naik sebesar 12,04 % atau menjadi Rp 809.229.173.421,00. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 24,54% atau menjadi Rp 1.007.776.182.838,00.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.4. juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Dompu tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Pada tahun 2015 rasio efisiensinya sebesar 88,22%, kemudian tahun 2016 menjadi 108,07%, tahun 2017 sebesar 111,41%, tahun 2018 sebesar 98,49%, dan tahun 2019 sebesar 91,87%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Dompu yang tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 99,61% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar dari pada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2016 dan 2017. Meskipun pada tahun 2016 dan 2017 tersebut Pemerintah Kabupaten Dompu sudah dapat menekan belanjanya dari pada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Dompu dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Melisa Anastasia. B (2012) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Kinerja keuangannya jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien karena rata-ratanya sebesar 87,34%. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah berhasil menerapkan efisiensi anggarannya. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam penelitian ini dimana efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Tidak Efisien.

5. Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.5. dan 5.6. dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten Dompu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2018 dimana terjadi penurunan belanja daerah. Pada tahun 2015 belanja daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp 568.072.452.180,00, naik menjadi Rp 769.142.354.777,00 pada tahun 2016. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 menjadi Rp 804.635.000.321,00. Dan pada tahun 2018 terjadi penurunan belanja daerah menjadi Rp 797.077.475.755,00, naik kembali pada tahun 2019 menjadi Rp 925.821.578.064,00.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Vertikal Dalam Negeri selalu terjadi peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Masing-masing sebesar : Rp 425.300.060.386,00: Rp 577.494.559.219,00:

Rp 733.757.544.269,00; Rp 743.451.499.455,00; dan Rp 818.040.451.153,00. Sedangkan Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2017 dan 2018 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari tabel 5.5. dan 5.6. itu juga dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2015 Rasio Belanja Operasinya sebesar 74,87% mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 75,08%, kemudian naik lagi pada tahun 2017 menjadi 91,19%, dan pada tahun 2018 naik menjadi 93,27%. Baru pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 88,36%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 84,55%. Sedangkan pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2015 sebesar 19,74% turun menjadi 18,39% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 8,69%, dan turun lagi pada tahun 2018 menjadi 6,69%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan kembali menjadi 11,43% sehingga rata-rata rasionya sebesar 12,99%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji (PNS). Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Dompu kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2008) dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen jika dilihat dari Rasio Keserasian masih kurang stabil Karena selalu terjadi kenaikan maupun penurunan di tiap-tiap periode. Hal tersebut hampir sama apa yang terjadi pada penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu jika dilihat dari Rasio Keserasian masih tidak stabil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00% - 10,00%. Berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rasionya masing-masing sebesar : 6,46%; 7,05%; 6,88%; 5,82%; dan 6,65%.

2. Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rasionya masing-masing sebesar : 7,02%; 7,75% : 7,39% : 6,33% : dan 7,35%.
3. Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu jika dilihat dari Rasio Efektivitas (PAD) diketahui bahwa efektivitas keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu tahun 2017 dan 2018 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 99,39% dan 83,34%. Tahun 2015, 2016, dan 2019 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 135,43% : 110,63% : dan 114,76%.
4. Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Dompu tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rasionya masing-masing sebesar : 88,22% : 108,07%; 111,41% : 98,49% : dan 91,87%.
5. Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu jika dilihat dari Rasio Kecerahan adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran 74,87%-93,27%, rata-rata sebesar 84,55%, hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Untuk belanja modal berada pada kisaran 6,69%-19,74%, rata-rata sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Dompu masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Farid Anshari, (2020). *Kabid Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Dompu*.
- R.Dedi Darma Pramana, SE, M.Ak (2020). *Kasubid Akuntansi: BPKAD*
- Ajhar, (2020). *Kasubid Pelaporan & Pertanggung Jawaban Keuangan: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu*.
- Afraruddin, (2020). *Kasubid Evaluasi& Pembinaan Akuntansi: BPKAD Kab. Dompu*.
- Fitriyah Agustin. (2007). "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hendro Sumarjo. (2010). "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Ibnu Syamsi. (1986). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mirna Sesotyaningsih. (2012). “Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmentak, Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Mohammad Mahsun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Nurhidayat. (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Suparmoko. (1987). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE.
- Sri Wahyuni. (2008). “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sri Widada. (2012). “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.” *Skripsi Fakultas Ekononmi Universitas Negeri Yogyakarta*.